

BAB III

Perkembangan Isu Pertahanan Jepang

Dalam memahami perkembangan kebijakan pertahanan Jepang lebih jauh, maka kita dapat melihatnya dari tiga peristiwa besar atau bersejarah yang mengiringi perjalanan arah pergeseran dan kebijakannya yaitu pasca perang dunia II, pasca perang dingin, pasca insiden 9/11.

Setelah memahami perkembangan militer Jepang melalui sejarah yang mengiringinya, dalam sub bab berikutnya penulis akan memaparkan mengenai peningkatan kapabilitas militer Jepang dengan melihat tiga indikator yaitu kekuatan militer, teknologi militer dan doktrin pertahanan. Peningkatan kapabilitas militer Jepang ini banyak mengalami peningkatan terutama periode paska insiden 9/11 yang merupakan salah satu peristiwa internasional yang membuat Jepang lebih banyak terlibat dalam dunia internasional. Paska insiden tersebut misi SDF diluar Jepang mengalami peningkatan. Hal tersebut pula yang sedikit banyak mempengaruhi perkembangan militer Jepang di periode-periode selanjutnya.

Perubahan postur pertahanan Jepang inilah yang nantinya akan di gunakan untuk menganalisa bagaimana respon Tiongkok sebagai negara yang memiliki sejarah hubungan yang menarik dengan Jepang seperti yang telah di jelaskan pada Bab sebelumnya.

A. Sejarah Perkembangan Pertahanan Jepang

Perkembangan militer Jepang pasca Perang Dunia II sangat bertolak belakang dengan politik internasionalnya. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan Jepang membangun perekonomiannya pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II tidak sejalan dengan kekuatan militer untuk menopang posisinya dalam percaturan politik dunia.

Ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, hal tersebut mengubah figure Jepang menjadi negara non militeristik. Kekuatan militer yang menjadi penyokong Jepang di kancah peperangan di demiliterisasi dengan mencabut hak-hak atas kepemilikan angkatan bersenjata dan potensi perang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan konstitusi baru Jepang pasca Perang Dunia II. Meski pada akhirnya, Jepang diperbolehkan memiliki perangkat pertahanannya dengan dibentuknya *Japan Self Defence Force (JSDF)* atau pasukan bela diri yang berperan dalam menjaga internal Jepang.

Dalam perkembangannya, kesadaran berupa pertumbuhan ekonomi yang pesat, dorongan dari sekutunya Amerika Serikat dan konteks internasional yang terus berubah membuat Jepang akhirnya mempertimbangkan untuk mulai mengubah postur militer pertahanan dan keamanannya. Oleh karena itu dalam sub bab ini, kita akan melihat tiga peristiwa besar yang mengiringi perubahan kebijakan pertahan Jepang, yaitu pasca Perang Dunia II, Pasca Perang Dingin, dan Pasca Insiden 9/11.

a. Pasca Perang Dunia II

Pasca kekalahan yang diterimanya dalam perang dunia II, Jepang harus menelan pil pahit bahwa implikasi dari hal tersebut bahwa secara penuh Jepang berada dibawah kependudukan Amerika Serikat. Khususnya dalam bidang militer, segala bentuk potensi perang yang dimiliki Jepang dicabut atau di demiliterisasi. Pembatasan segala aktifitas militer Jepang tersebut tertuang dalam Undang-undang baru Jepang khususnya pasal 9.

Jika diterjemahkan, Pasal 9 Konstitusi tersebut berbunyi: “Dengan maksud yang sungguh-sungguh untuk menciptakan perdamaian internasional berlandaskan keadilan dan ketertiban, maka rakyat Jepang untuk selama-lamanya menolak perang sebagai hak bangsa yang berdaulat dan menolak pula penggunaan ancaman kekuatan sebagai cara untuk mengatasi persengketaan-persengketaan internasional. Untuk mewujudkan maksud tersebut, angkatan-angkatan darat, laut, dan udara maupun potensi perang lainnya tidak akan pernah diadakan. Hak berperang yang ada pada negara tidak akan diakui.”

Berdasarkan pasal tersebut Jepang menyatakan tidak akan memiliki angkatan perang sendiri dan tidak akan memulai perang. Konstitusi yang diadopsi Jepang pasca perang tersebut disepakati dengan pihak AS melalui *Supreme Commander for the Allied Power (SCAP)*.²⁶ Oleh karena itu, Jepang pasca perang sangat berhati-hati dan selalu berpegang konstitusi tersebut dalam pengambilan politik internasionalnya khususnya yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan.

²⁶ Jeff Kingston, *Contemporary Japan: History, Politic, and Social Change Since the 1980s* (West Sussex: Willey- Blackwell, 2011), hlm.4-5

Inilah yang kemudian membuat Yoshida Shigeru, Perdana Menteri Jepang pasca Perang Dunia II (1946-47 dan 1948-1954), lebih berfokus ada perbaikan ekonomi Jepang terlebih jika melihat kehancuran yang didera Jepang akibat perang dan mempercayakan masalah keamanan pada AS. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga pokok penting doktrin yang dikeluarkannya, yaitu²⁷:

1. Untuk meletakkan postur internasional Jepang dibawah pertumbuhan ekonomi nasional
2. Untuk memelihara sikap *low profile* dalam masalah internasional
3. Untuk bergantung pada kemampuan pertahanan diri moderat dikombinasikan dengan jaminan keamanan AS.

Akan tetapi, pada tahun 1950 Jepang dihadapkan pada sebuah dilema. Ketika itu, Amerika Serikat terjun dalam perang Korea dan sangat mengkonsentrasikan kekuatannya dalam peperangan tersebut sehingga AS meminta Jepang untuk menanggung beban keamanannya sendiri. Selama ini, sejak masa pendudukan AS diketahui bahwa Jepang berada dalam payung keamanan AS.

Akhirnya pada bulan Juli tahun 1950, dibawah tekanan kuat AS terhadap Jepang untuk mengambil bagian dalam menanggung beban militer maka dibentuk kesepakatan oleh pihak AS dengan Perdana Menteri Yoshida serta kabinetnya mengenai pembentukan *National Police Reserve* (NPR) yang bertugas untuk membantu pasukan pendudukan AS dalam menjaga keamanan Jepang. Pada tahun 1952 NPR diubah menjadi *National Safety Force* dan pada tahun 1954 diubah

²⁷Rosy Handayani, *Transformasi Pertahanan Jepang Pasca Perang Dingin (1991-2007)*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2008.

kembali menjadi *Self Defence Force* (SDF). Pemerintahan Yoshida juga membentuk badan yang secara khusus yang bertugas untuk mengontrol SDF. SDF yang dibentuk sebagai polisi keamanan bagi Jepang tersebut terbagi kedalam tiga komponen yaitu *Ground Self Defence Force* (GSDF), *Maritime Self Defence Force* (MSDF) dan *Air Self Defence Force* (ASDF).²⁸

Di tahun yang sama pula, 1952, Jepang mendapatkan kembali kedaulatannya dengan ditandatanganinya perjanjian damai San Francisco. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam *Mutual Security Assistance Pact*.

Tiga tahun pasca terbentuknya SDF, pada tahun 1957 masih dibawah Pemerintahan Perdana Menteri Yoshida, Jepang mengeluarkan kebijakan keamanan militernya yaitu *Basic Policy for National Defence* (BPND). Pasca dikeluarkannya BPND tersebut, secara bertahap Jepang melakukan peningkatan terhadap peran SDF. Setahun berselang Jepang mengeluarkan *Japan Defence Build Up Program* atau program pembangunan pertahanan yang pertama yang akan diimplementasikan sepanjang tahun 1958-1961. Kemudian secara berkala Jepang menerbitkan *Japan Defence Build Up Program* keduanya untuk tahun 1962-1966, *Japan Defence Build Up Program* ketiga untuk tahun 1967-1971, serta *Japan Defence Build Up Program* ke empat untuk tahun 1972-1976. Kebijakan keamanan yang diterbitkan secara berkala tersebut, secara umum berisi peningkatan-peningkatan peran SDF secara kuantitatif maupun kualitatif baik itu peningkatan kekuatan darat, laut, maupun udara. Hal tersebut membuktikan

²⁸ Epica Mustika Putro, 2012. "*Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang*", Jakarta: Universitas Indonesia.

bahwa Jepang serius menanggapi permintaan AS untuk mulai menanggung beban keamanannya sendiri.

Lebih lanjut, pada tahun 1976 Jepang merumuskan *National Defence Programme Guidelines* (NDPG) yang mengadopsi prinsip dasar dari BPND. NDPG tersebut merupakan doktrin pertama Jepang yang pertama pasca Perang Dunia II. NDPG ini berisikan upaya Jepang dalam mencapai kerangka pertahanan nasionalnya secara *defence* dan *deterrence* yakni menciptakan kekuatan pertahanan Jepang yang dapat menangkal dan menahan serangan secara efektif.²⁹

Perkembangan militer Jepang telah bertumbuh dibawah kepemimpinan Zenko Suzuki. Hal tersebut ditunjukkan dengan disepaktinya kebijakan yang mendukung perkembangan militer Jepang, berupa pemerintahan Jepang akan mengembangkan fungsi dan perannya dalam pertahanan yang mencakup 1.000 nautical mil dari batas laut kearah selatan dan tenggara. Keputusan ini secara resmi telah diungkapkan dalam salah satu pidato perdana menteri Zenko Suzuki di Washington pada tahun 1981. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1983 dibawah Perdana Menteri Naksonne menyatakan Jepang sebagai “kapal induk yang tidak bisa ditenggelamkan” bagi AS serta mendukung alih teknologi pertahanan AS dan bergabung dalam penelitian *Strategi Defense Initiative* pada tahun 1986.³⁰

Fakta diatas menunjukkan sejak tahun 1954 sampai 1986, tepatnya setelah Amerika Serikat meminta Jepang untuk menjaga keamanan negaranya secara mandiri pertahanan militer jepang mengalami pertumbuhan militer yang cukup signifikan dari masa kemasa. Hal ini menunjukkan Jepang secara konsisten

²⁹ *ibid*

³⁰ Masashi Nishihara, “Japan ‘s Gradual Defense Build up and Korean Security”, The Korean Journal of Defense Analysis, Vol.1, No. 1, 1998, hlm.104

memiliki hasrat untuk terus membangun dan mengembangkan militer yang lebih mapan.

b. Pasca Perang Dingin

Berakhirnya perang dingin sekaligus mengubah kondisi keamanan di Asia Timur. Berakhirnya perang dingin semakin mendorong Jepang untuk meningkatkan kemampuan politik dan militernya yang sejalan dengan pertumbuhan ekonominya. Selain itu, Jepang kemudian dihadapkan pada tantangan baru berupa gejolak yang timbul dari lingkungan eksternal, diantaranya pertunjukan uji coba misil Korea Utara dan peningkatan Kapabilitas militer Tiongkok. Hal tersebut pula yang mendorong Jepang untuk mengkaji ulang kebijakan pertahanannya.

Periode tahun 1990an terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam kebijakan pertahanan Jepang. Terlihat tanda-tanda bahwa Jepang mulai meninggalkan postur pasifis-isolasionis menuju sikap yang lebih aktif dalam merespon lingkungan eksternalnya. Perekonomiannya yang terus tumbuh dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar didunia mendorong hasratnya untuk menjadi bagian dari pemain utama percaturan politik dunia bukan hanya dalam bidang ekonomi, namun juga dalam kewan dan pertahanan.

Keinginan Jepang mendapatkan kursi tetap Dewan Keamanan PBB menjadi salah satu bukti keinginan Jepang menjadi negara yang lebih aktif.³¹ Selain itu sejak berakhirnya perang dingin, pembatasan SDF mulai longgar. Hal ini ditandai dengan pengiriman pasukan SDF dalam operasi keamanan PBB pada tahun 1990-

³¹ An Argument for Japan's Becoming Permanent Member diakses melalui http://www.mofa.go.jp/policy/q_a/faq5.html pada tanggal 12 Maret 2017

an, pengiriman untuk Operasi Penjaga Perdamaian dan bahkan belakangan juga ikut mendukung perang AS di Irak dan Afghanistan.

Perubahan yang cukup signifikan bagi perkembangan arah kebijakan pertahanan Jepang terjadi pada tahun 1992 yakni di era perdana menteri Kiichi Mizawa, UU Operasi Pemeliharaan Keamanan (*the Peacekeeping Operation Law- PKO Law*) di sahkan *Diet*. UU tersebut terdiri dari 5 prinsip yang kemudahan menjadi syarat pengiriman SDF Jepang, yaitu; (1) Sudah ada perjanjian gencatan senjata, (2) pihak yang bertikai bersedia menerima kehadiran pasukan perdamaian, (3) PKO bersifat imparial, (4) Jepang bisa menarik diri dari kondisi tidak memuaskan, (5) Senjata yang digunakan SDF terbatas hanya untuk membela diri. UU Operasi Pemeliharaan Keamanan tersebut menjadi langkah progresif bagi Jepang untuk lebih andil dalam dunia internasional. Walaupun pengiriman SDF keluar Jepang bukan merupakan sebuah pengiriman untuk misi tempur serta dibatasi dengan sejumlah syarat, hal tersebut merupakan kemajuan yang luar biasa bagi peranan SDF di luar Jepang.³² Perdana Menteri Kiichi Mizawa (1991-1993) juga melalui ide-ide dan gagasannya melakukan upaya-upaya untuk memperkokoh keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik dan merumuskan keamanan di kawasan di masa yang akan datang dengan melakukan peningkatan melakukan dialog yang intensif mengenai keamanan dan politik antara negara-negara di kawasan. Lebih lanjut, Kiichi Mizawa juga membangun forum dalam

³² Lillahi, R. (2014). *Postur Pertahanan Jepang Pasca Pembentukan Kementerian Pertahanan (2007-2013)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

merancang strategi pembangunan yang komprehensif.³³ Selanjutnya, masa pemerintahan Perdana Menteri Morihiro Hosokawa (1993-1994) memutuskan untuk melanjutkan kebijakan sebelumnya untuk melakukan kerjasama dengan AS dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Dari kepemimpinan era perdana menteri tersebut setidaknya pasca perang dingin Jepang kembali menunjukkan keinginannya memiliki sistem pertahanan yang mapan dan menaruh perhatian lebih dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya penyumbang terbesar yang mempengaruhi pegerseran kebijakan pertahanan Jepang pasca perang dingin adalah timbulnya gejolak kemanan di kawasan Asia Timur. Hal tersebut diantaranya yaitu uji coba misil dan program nuklir Korea Utara pada tahun 1993 yang dilakukan di laut Jepang. Juru bicara perdana Menteri Luar negeri Jepang mengatakan bahwa uji coba nuklir Korea ini mengagetkan dan membuat negaranya khawatir.³⁴ Selain itu, peningkatan kapabilitas militer Tiongkok pada tahun 1995-1996 juga mengkhawatirkan bagi Jepang. Selanjutnya, pada tahun 1998 Korea Utara kembali melakukan uji coba misil balistik yang diarahkan ke wilayah Jepang. Untuk itu, dalam merespon hal tersebut Jepang akhirnya memutuskan untuk ikut dalam penelitaian bersama dengan AS dalam sistem pertahanan misil *Balistic Missiled Defense* (BMD).

³³ Mulyanto Sastrowiranu dalam Rosy Handayani, 2007. *Upaya Jepang Mengatasi Peningkatan Peran China Di Kawasan Asia Timur: Studi Kasus East Asia Summit 2005*. Jakarta: Universitas Indonesia.

³⁴ Missile Is Tested By Nort Koreans diakses melalui <http://www.nytimes.com/1993/06/13/world/missile-is-tested-by-north-koreans.html> pada tanggal 12 Maret 2017

Secara garis besar, gejolak yang timbul pasca perang dingin dari lingkungan eksternal khususnya dari negara-negara di kawasan memaksa Jepang untuk mulai ikut andil dan menaruh perhatian lebih pada pertahanan dan keamanannya. Hal ini dikarenakan jika Jepang lengah menyadari kelemahannya yang salah satunya di sebabkan keunikan yang dimiliki Jepang berupa negara tanpa militer aktif dapat mengancam posisi Jepang sewaktu-waktu. Walaupun bergerak perlahan, namun dengan pengirimannya pasukan SDF keluar negeri baik dalam membantu tentara AS ataupun pasukan perdamaian di bawah PBB hal tersebut dapat dijadikan sebuah batu loncatan bagi pertumbuhan militer Jepang untuk lebih berperan dan aktif dalam dunia internasional.

Meningkatnya bahaya militer dalam lingkungan keamanan internasional membuat Jepang akhirnya mengeluarkan NDPO (*National Defense Program Outline*) baru pada tahun 1995 untuk memperbaharui NDPO tahun 1976. Dengan diterbitkannya NDPO baru Jepang berkeinginan untuk terus meningkatkan perhatiannya pada keamanan lingkungan regional dan memberi kontribusi yang lebih besar bagi keamanan internasional.

c. Pasca Insiden 9/11

Insiden serangan terorisme yang terjadi di Amerika Serikat pada September 2001 merupakan peristiwa internasional yang juga menjadi penyumbang bagi perkembangan pertahanan Jepang. Pasca insiden tersebut, AS mengeluarkan kebijakan “*war on terror*” yang ditujukan kepada dunia internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Jepang merespon kebijakan tersebut dengan menunjukkan sikap aktif dan menunjukkan keinginannya untuk lebih terlibat

dalam menjaga tatanan keamanan internasional. Jepang akhirnya mengeluarkan beberapa Undang-undang baru serta memperluas interpretasi pasal 9 konstitusi pasca perang. Salah satu Undang-undang baru tersebut adalah *Anti-Terrorism Special Measures Law* yang dikeluarkan pada tahun 2001.

Anti-Terrorism Special Measures Law yang dikeluarkan pada tahun 2001 merupakan langkah-langkah hukum khusus yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dalam mendukung kegiatan negara asing yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari piagam PBB sebagai respon terhadap serangan teroris yang berlangsung pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat serta sebagai tindakan kemanusiaan berdasarkan resolusi PBB.³⁵ Berdasarkan UU tersebut Jepang dapat memberikan dukungan melalui bantuan suplai bahan bakar, transportasi bahan bakar maupun transportasi personel dan logistik serta kegiatan lainnya berupa perbaikan dan pemeliharaan, kegiatan medis dan jasa domestik pelabuhan laut pada negara atau wilayah Jepang, wilayah yang terletak di garis pantai samudera Hindia, Pulau Guam Amerika Serikat, pulau Diego Garcia Inggris serta sepanjang rute wilayah yang telah disebutkan tersebut.³⁶ Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut Jepang dapat mengirimkan SDF untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan non tempur kepada AS dan pasukan multinasional.

³⁵ The Anti-Terrorism Special Measures Law Diakses melalui http://japan.kantei.go.jp/policy/2001/anti-terrorism/1029terohougaiyou_e.html pada tanggal 13 Maret 2017

³⁶ Outline of the Basic Plan regarding Response Measures Based on the Anti-Terrorism Special Measures Law diakses melalui http://japan.kantei.go.jp/policy/2001/anti-terrorism/1116keikakus_e.html pada tanggal 13 Maret 2017

Keikutsertaan SDF dalam “*war on terror*” telah memprakarsai bagi perluasan misi SDF keluar wilayah Jepang. Sehingga Jepang akhirnya memiliki peran global yang baru yaitu ikut menjaga keamanan lingkungan internasional “ *to improve the international security environment*”³⁷. Hal ini tertuang dalam *National Defense Programme Guidelines* (NDPG) tahun 2004. NDPG yang dikeluarkan tahun 2004 ini adalah merupakan respon Jepang terhadap Insiden 9/11 yang merupakan peristiwa yang terjadi dalam lingkup internasional. NDPG tahun 2004 ini merupakan sebuah dokumen yang merupakan dasar kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang pertahanan, peran kemampuan pertahanan serta merupakan dasar bagi pengembangan kemampuan pertahanan Jepang kedepannya.

Pada tahun 2009, pengiriman SDF keluar Jepang kembali mengalami perkembangan. Dalam mendukung operasi keamanan kapal-kapal komersial asing di wilayah Teluk Aden dan perairan Somalia sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian *Anti-Piracy Law* Jepang mendirikan pangkalan SDF di Djibouti, daerah disekitar Somalia yang hal ini merupakan untuk pertama kalinya bagi Jepang mendirikan pangkalan diluar Jepang setelah Perang Dunia II.³⁸

Selain itu, ancaman regional yang datang dari peningkatan kapabilitas militer Tiongkok yang dianggap tidak transparan serta percobaan nuklir Korea Utara yang masih terus berlanjut. Pada tahun 2002-2003 Korea Utara kembali melakukan percobaan nuklir yang kedua. Hal tersebut yang membuat Jepang

³⁷ Defense of Japan 2011 diakses melalui http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2011.html pada tanggal 13 Maret 2017

³⁸ Establishment of Facility for counter-piracy mission in Djibouti diakses melalui <http://www.mod.go.jp/e/jdf/no23/topics01.html> pada tanggal 14 Maret 2017

mengeluarkan buku putih pertahanan Jepang tahun 2004 yang didalamnya memuat dan menyatakan bahwa aktifitas yang dilakuakn oleh Tiongkok dan Korea Utara merupakan sebuah ancaman keamanan.

Salah satu hal penting lainnya dalam perkembangan kebijakan pertahanan Jepang adalah pada bulan Januari 2007 dimasa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe Jepang melakukan penguatan posisi SDF melalui pembentukan Kementerian Pertahanan (*Ministry of Defence*) yang menggantikan Badan Pertahanan (*Defence Agency*) dan mendapat tempat *independent* di Kabinet. Melalui perubahan ini Kementerian Pertahanan dapat secara langsung mengajukan rancangan Undang-undang dan mengajukan rancangan undang-undang ke Kementerian Keuangan.

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa ada perubahan yang cukup signifikan dalam kebijakan pertahanan Jepang. Perubahan yang diawali dari dorongan dari AS, kemudian konteks internasional yang terus berubah akhirnya memaksa Jepang untuk lebih meningkatkan kapabilitas militernya.

B. Peningkatan Kapabilitas militer Jepang

Kapabilitas militer adalah kemampuan dari kekuatan militer suatu negara yang dapat digunakan untuk melakukan seragkaian operasi untuk mengejar kepentingan negara yang bersangkutan ataupun menghadapi ancaman musuh. Peningkatan kapabilitas militer suatau negara inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dan melihat sejauh mana suatu negara melakukan peningkatan kekuatan militernya.

Dalam mengukur kapabilitas militer suatu negara, menurut Stephen Biddle dalam bukunya *Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle* (2004) dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni dengan melihat jumlah kekuatan militer, indikator teknologi militer, dan doktrin tujuan dari penggunaan kekuatan militer. Oleh karena itu, dalam sub bab ini penulis akan memaparkan peningkatan kapabilitas militer Jepang melalui tiga cara tersebut.

a. Kekuatan Militer

Meskipun Jepang tidak memiliki angkatan bersenjata seperti negara lain pada umumnya namun Jepang memiliki pasukan bela diri yang khusus yang siap sedia dan selalu siaga dalam menjaga kemandirian Jepang dan membela kepentingan Jepang. Dalam melihat peningkatan kapabilitas militer Jepang, pasukan bela diri Jepang tersebut dapat dijadikan indikator untuk mengukur peningkatan kapabilitas militernya. Hal tersebut tidak terlepas dari JSDF Jepang memiliki peranan yang sangat penting dalam menyokong perkembangan pertahanan dan keamanan Jepang.

Pasukan bela diri Jepang atau disebut dengan *Japan Self Defense Force* (JSDF) terbagi kedalam tiga cabang kekuatan yaitu, kekuatan bela diri darat (*The Japan Ground Self-Defense Force*), Kekuatan bela diri laut (*The Japan Maritime Self-Defense Force*) dan Kekuatan bela diri udara (*The Japan Air Self-Defense Force*). Jumlah keseluruhan personel aktif Jepang pada tahun 2016 adalah sekitar 250.000 dan jumlah pasukan cadangan yang berjumlah sekitar 57.900 personel. Selain itu tiap-tiap pasukan bela diri Jepang baik darat, laut, maupun udara dilengkapi dengan alat utama sistem pertahanan yang canggih. Hal tersebut

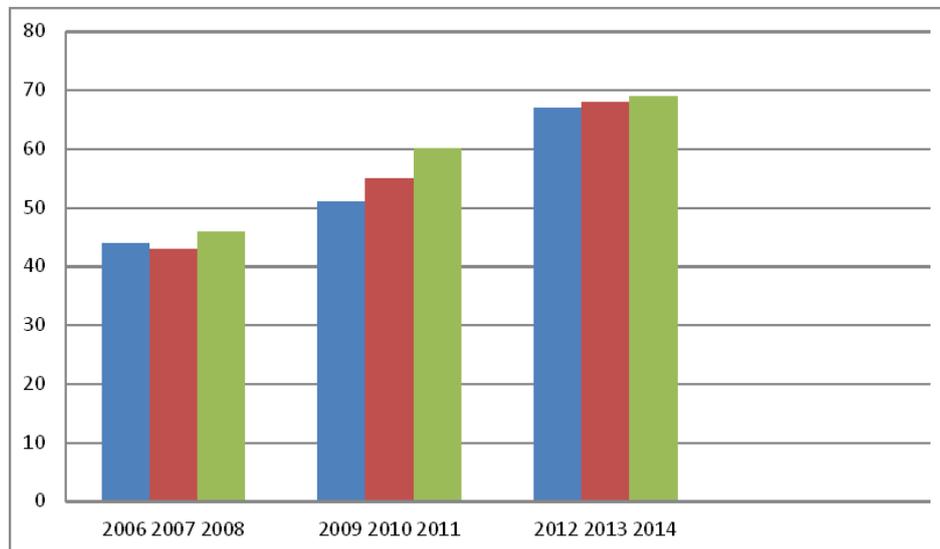
menjadikan Jepang masuk kedalam posisi 24 dengan kekuatan bersenjata terbesar didunia dan dengan belanja militer tahunan lebih dari 50 miliar USD menempatkan Jepang di peringkat ke 7 dalam hal belanja militer.³⁹ Meskipun jumlah JSDF ini mengalami pasang surut dan cenderung mengalami penurunan namun jumlah yang berkurang tersebut membuat pasukan beladiri Jepang sekarang menjadi lebih efisien dan efektif bagi pergerakan misi JSDF. Jika sebelumnya misi JSDF hanya untuk menjaga keamanan internal Jepang kini misinya mengalami perluasan diantaranya terlibat *Peace Keeping Operation* dibawah PBB dan penjagaan diwilayah laut di pulau Guam, Amerika Serikat dan pulau Diego Garcia, Inggris.

Selain misi JSDF yang mengalami perluasan, anggaran pertahanan Jepang secara mengalami perkembangan dan peningkatan yang dibuktikan dengan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2006 sampai tahun 2014. Anggaran pertahanan merupakan salah satu penting dalam melihat perkembangan militer suatu negara karena besar kecilnya anggaran militer merupakan alat ukur bagi belanja militer suatu negara. Berikut grafik yang menunjukkan peningkatan anggaran militer Jepang dari tahun 2006-2014.

³⁹The Self Defence Force diakses melalui <http://www.unmissablejapan.com/etcetera/self-defence-force> pada tanggal 16 Maret 2017

Grafik 1

Anggaran Pertahanan Jepang 2006-2014



Sumber: Diolah dari data resmi Kementerian Pertahanan Jepang (diukur dalam miliar USD)

Dilihat dari tabel diatas, walaupun sempat mengalami penurunan angrgan perthananan pada tahun 2007 namun secara keseluruhan dari tahun 2006-2014 Jepang terus menunjukkan angka angrgan militer Jepang bergerak naik. Meskipun Jepang dibatasi oleh ketentuan yang menyatakan bahwa anggaran pertahanan militer Jepang tidak diperkenankan melebihi dari jumlah 1% dari GDP. Namun pembatasan anggaran militer Jepang tersebut tidak otomatis menjadikan Jepang memiliki anggaran militer yang lebih renda dari negara lain yang memiliki jumlah persentase anggaran militer yang lebih besar dari GNP. Walaupun hanya menetapkan angka 1% dari total GNP untuk pendanaan militernya namun dengan kemampuan ekonomi yang besar seperti yang dimiliki Jepang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan kekuatan militer.

b. Teknologi Militer

Selanjutnya hal yang dapat dijadikan indikator dalam melihat peningkatan kapabilitas militer Jepang adalah teknologi militer yang dimilikinya. Dalam bidang teknologi pertahanan, Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki teknologi pertahanan yang maju. Meskipun Jepang tidak Berikut penulis memaparkan beberapa kemajuan teknologi militer yang dimiliki oleh Jepang.

Grafik 2

Tekhnologi Terbaru Militer Jepang

Nama	Jenis	Tahun
<i>Control Missile Type-99 Air-to-air</i>	Misil Pengendali	2006
<i>Missile Type-03 Chu-SAM</i>	Pertahanan Misil	2006
<i>Radar FBX-T</i>	Radar Pertahanan	2007
<i>SH-60J Helicopter</i>	Helikopter Anti Kapal Selam	2007
<i>SM-3 Missile</i>	Panangkal misil balistik	2007
<i>AH-64 D Longbow Apache</i>	Helikopter tempur	2007
<i>MBT-X Type 10</i>	Tank Tempur	2008
<i>16 DDH/ Hyuga</i>	Kapal Induk Pengangkut (<i>Aircraft Carrier</i>)	2009
<i>P-3C iron</i>	Pesawat Pengintai	2010
<i>Submarine ASW Hunter Killer</i>	Kapal Selam	2010
<i>F-35 Lightning II</i>	Jet Tempur	2011
<i>C4ISR</i>	Sistem Tekhnologi Satelit	2012
<i>ATD-X Shinsin</i>	Jet Tempur	2012

Sumber: Diolah dari website resmi Kementerian Pertahanan Jepang www.mod.go.jp dan www.globalsecurity.org/military/world/japan dalam Ahmad Despuriansyah, "Kepentingan Amerika Serikat Dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pertahanan Dan Keamanan Jepang Periode 2006-2012.

Jika dilihat dari tabel diatas, teknologi militer Jepang akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Industri pertahanan Jepang tersebut sangat difokuskan untuk mendukung misi JSDF. Perkembangan selanjutnya mengenai

industri pertahanan Jepang adalah adanya pelanggaran larangan ekspor persenjataan dan teknologi militer Jepang pada tahun 2011. Meski pelanggaran ekspor hanya terbatas pada sekutu saja seperti AS namun hal tersebut memberikan gerak labih bagi Jepang untuk menunjukkan keunggulan teknologinya khususnya dalam menunjang peralatan militer untuk misi kemanusiaan.

c. Doktrin Pertahanan

Sebuah doktrin pertahanan dapat digunakan sebagai alat untuk melihat penggunaan kekuatan militer suatu negara. Didalam doktrin pertahanan satu negara, dapat diketahui bagaimana suatu negara menggunakan kekuatan militernya, salah satunya untuk mencapai kepentingan negaranya. Dalam hal ini, Jepang juga memiliki doktrin pertahanan. Jepang memiliki doktrin pertahanan yang disebut dengan *National Defense Program Guidelines* (NDPG). NDPG adalah doktrin militer tertinggi dari kebijakan pertahanan Jepang untuk menetapkan dasar, nilai-nilai serta prinsip pertahanan dan keamanan dari *Japan Self Defense Force*.⁴⁰

Japang diketahui telah beberapa kali memperbaharui doktrin pertahanannya. Doktrin pertahanan Jepang pertama kali dikeluarkan tahun 1976, kemudian diperbaharui tahun 1995, 2004, 2010 dan yang terakhir di tahun 2014.

Doktrin pertahanan Jepang pertama yang dikeluarkan pada tahun 1976 dirumuskan dengan latar belakang yang *détente*⁴¹ tahun 1970-an . Dalam NDPG tahun 1976 Jepang menyadari bahwa (1) secara umum bentrokan militer skala

⁴⁰ Tomotoka Shoji “*Japan’s Security Outlook: Security Chalange and the New National Defense Program Guidline*” dalam *Security Outlook of the Asia Pasifik Countries and Its Implications for the Defense Sector*. NIDS Join Research Series No. 6, 2011.

⁴¹ Hal ini mengacu pada meredanya ketegangan hubungan konfrontasi antara AS dan Uni Soviet yang disebut dengan Perang Dingin, dipicu oleh Krisis Kuba Tahun 1962. Situasi ini mengakhiri intervensi militer Uni Soviet di Afganistan tahun 1979.

penuh antara Timur dan Barat akan sangat tidak mungkin terjadi dan (2) disekitar Jepang hubungan yang seimbang antara AS, China, dan Uni Soviet, dan adanya aliansi antara keamanan Jepang-AS akan memainkan peran penting dalam mencegah invansi serius terhadap Jepang. Berkaitan dengan kemampuan pertahanan Jepang, dalam NDPG tahun 1976 Jepang memperkenalkan “*Basic Defense Force Concept*” yang bertujuan untuk menciptakan kekuatan pertahanan minimum yang menekankan untuk mencegah invansi ke Jepang dan secara khusus menekankan bahwa kekuatan pertahanan minimum (JSDF) (1) harus dilengkapi dengan berbagai fungsi yang diperlukan untuk pertahanan, (2) berada dalam postur yang seimbang dalam organisasi dan penyebaran, termasuk bantuan logistik (3) mengambil sikap yang memadai di masa damai (4) mencegah dan menangkali invansi yang disebut dengan “*limited and small-scale aggression*” dan (5) disesuaikan dalam situasi dan posisi ketika terjadi perubahan yang diperlukan sehubungan dengan kemampuan pertahanan.

National Defense Program Guideline Jepang yang kedua dikeluarkan tahun 1995. NDPG dirumuskan dengan mempertimbangkan perubahan situasi internasional seperti berakhirnya perang dingin. Meski Jepang masih konsisten menjalankan konsep “*Basic Defense Force*” yang bertujuan untuk menciptakan kekuatan pertahanan minimum sebagai negara yang merdeka namun terdapat bagian yang dihilangkan yaitu “*limited and small-scale invasion*”. Hal tersebut berkaitan dengan semakin meluasnya peran dari militer Jepang yang dijalankan oleh JSDF. Kemudian dalam pedoman pertahanan Jepang tahun 1995 ini, Jepang terus menekankan pada pemanfaatan lebih lanjut dari kemampuan SDF tidak

hanya bagi pertahanan dan keamanan internal Jepang saja tetapi juga mengenai peran SDF dalam menanggapi dan memberikan bantuan bencana dalam skala besar dan berbagai situasi lainnya serta meningkatkan kontribusi bagi keamanan internasional.

National Defense Program Guideline selanjutnya dikeluarkan Jepang pada tahun 2004. NDPG 2004 ini dikeluarkan Jepang ditengah munculnya ancaman dan tantangan keamanan yang semakin beragam. Diantaranya meningkatnya poliferasi senjata pemusnah masal dan rudal balistik yang digencarkan oleh negara tetangganya, Korea utara, perkembangan militer Tiongkok serta adanya aktivitas atau kegiatan teroris internasional. Dalam NDPG tahun 2004 ini tertuang tujuan dari prinsip kebijakan pertahanan Jepang, yaitu (1) mencegah ancaman langsung mencapai Jepang, dan (2) meningkatkan lingkungan keamanan internasional, sehingga dapat mengurangi kemungkinan ancaman dari luar mencapai Jepang. Dalam mencapai tujuannya tersebut, Jepang melakukan pendekatan yaitu dengan melalui usaha Jepang sendiri, kerjasama Jepang-AS, dan kerjasama dengan masyarakat internasional. Dengan demikian, dalam hal konsep kemampuan pertahanan, pedoman pertahanan Jepang ini menekankan pada multifungsi, fleksibel dan efektif kekuatan pertahanan, karena hal tersebut diperlukan untuk menghadapi ancaman serta situasi yang beragam dari lingkungan eksternal dengan tetap mempertahankan konsep angkatan pertahanan dasar.

Pada tahun 2010, Jepang kembali mengeluarkan NDPG. Dalam NDPG tahun 2010 yang diimplementasikan tahun 2011 terjadi perubahan dalam konsep

dasar pertahanan dari *Basic Defence Force Concept* yang cenderung pada pertahanan pasif menjadi *Dynamic Defense Force* yang membuat JSDF dapat melakukan tindakan yang lebih aktif dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti operasi militer maupun kegiatan operasi intelijen.

Akhir tahun 2013, Jepang kembali merumuskan NDPG untuk tahun 2014. Dalam NDPG tahun 2014 menitik beratkan pada pada konsep kontribusi proaktif untuk perdamaian (*Proactive Contribution to PeaceI*). Dalam hal ini Jepang berusaha meningkatkan kekuatan militer sebagai usaha untuk menunjukkan eksistensi Jepang dan meningkatkan keterlibatan dan kontribusinya terhadap keamanan dn perdamaian internasional.

Melihat dan menganalisis doktrin pertahanan Jepang diatas dapat dilihat bahwa Jepang terus menunjukkan perkembangan dalam bidang pertahanan, salah satunya ditunjukkan melalui peningkatan status JSDF yang secara konsisten yang dimuat dalam program kebijakan pertahanan Jepang . Hal tersebut semakin membuktikan bahwa Jepang nampaknya memiliki fokus untuk terus menciptakan militer yang mapan.

Dari keseluruhan pembahasan Bab ini, mulai dari Sejarah perkembangan isu pertahanan Jepang yang dibagi kedalam tiga periode waktu yakni pasca Perang Dunia II, pasca Perang Dingin dan pasca Insiden 9/11 serta peningkatan kapabilitas militer Jepang yang dapat dilihat melalui tiga indikator yakni kekuatan militer, teknologi militer dan doktrin pertahanan menunjukkan kecenderungan bahwa Jepang meskipun pelan namun secara pasti dan konsisten telah mulai mengubah arah pertahanan dan militernya dari pasif menuju aktif. Oleh karena itu

dalam Bab berikutnya, menarik untuk penulis mengkaji dan menganalisa mengenai bagaimana respon dari Tiongkok sebagai negara yang memiliki keterikatan historis maupun geografis terhadap Jepang dengan melihat perkembangan isu pertahanan yang ditunjukkan oleh Jepang tersebut.